



Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

Safira Nur Zahira, Atih Rohaeti Dariah*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 27/4/2024

Revised : 27/6/2024

Published : 22/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 9 - 18

Terbitan : Juli 2024

ABSTRAK

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui keswadayaan. Program ini memberikan bantuan berupa subsidi sebesar 20 juta rupiah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Kabupaten Majalengka memiliki Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar 44,36 persen dengan perumahan dan fasilitas rumah tangga sebagai penyumbang terbesar yaitu 20,41 persen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BSPS dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan sebanyak 82 penerima bantuan. Data yang telah didapatkan dianalisis secara kuantitatif dengan melakukan *scoring* dan perhitungan persentase dari jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menemukan bahwa BSPS secara umum cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Majalengka dengan nilai sebesar 74%. Capaian nilai efektivitas tersebut tidak lepas dari keberhasilan setiap indikator yang sudah mencapai kategori cukup efektif dan sangat efektif, yaitu 1) Ketepatan sasaran sebesar 64%; 2) Keswadayaan Masyarakat sebesar 73%; 3) Kualitas Rumah Layak Huni Sesuai *SDG's* sebesar 81%; 4) Kesehatan sebesar 79%. Berdasarkan temuan ini maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan aspek-aspek yang kurang efektif dalam program BSPS.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, BSPS, Kemiskinan.

ABSTRACT

Self-help Stimulant Assistance Program (BSPS) is a policy to improve the quality of housing for low-income people through self-help. This program provides assistance in the form of subsidies of 20 million rupiah which is used to improve the quality of uninhabitable houses into habitable houses. Majalengka Regency has a Non-Food Poverty Line of 44.36 percent with housing and household facilities as the largest contributor at 20.41 percent. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of BSPS in reducing poverty in Majalengka District. This research method uses quantitative descriptive. The data used was 82 beneficiaries. The data obtained were analyzed quantitatively by scoring and calculating the percentage of answers given by respondents through questionnaires using Likert scales. This study found that BSPS was generally quite effective in alleviating poverty in Majalengka Regency with a value of 74%. The achievement of this effectiveness value cannot be separated from the success of each indicator that has reached the category of quite effective and very effective, namely 1) Target accuracy of 64%; 2) Community Self-Help by 73%; 3) Quality of Livable Houses According to *SDG's* of 81%; 4) Health by 79%. Based on these findings, it is necessary to evaluate and improve aspects that are less effective in the BSPS program.

Keywords : Public Policy, BSPS, Poverty

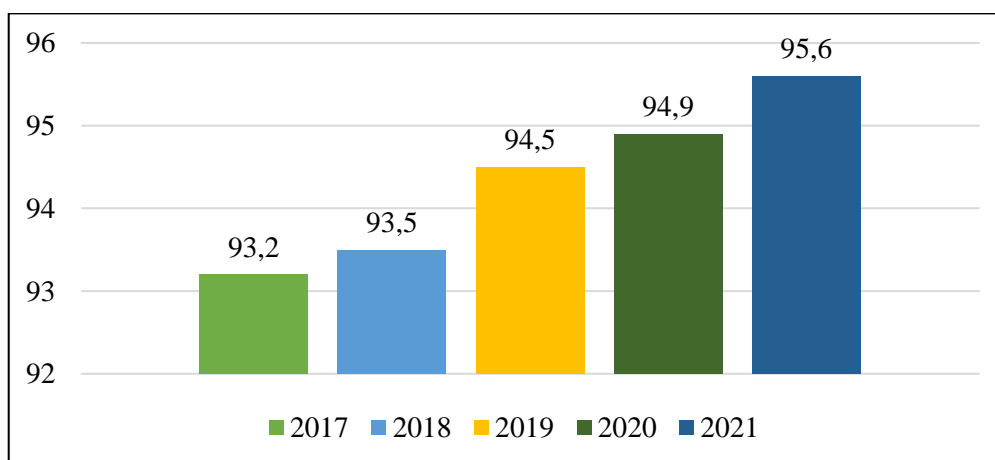
A. Pendahuluan

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan peringkat kemiskinan tertinggi yakni berada di posisi kelima dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2023. Persentase kemiskinan di Kabupaten Majalengka mencapai 11,21 persen pada tahun 2023 angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Jawa Barat yakni 7,62 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024). Persentase kemiskinan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,73 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, capaian tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dalam RPD tersebut, Kabupaten Majalengka menargetkan persentase kemiskinan tahun 2023 sebesar 10,37 persen. Dalam mewujudkan capaian penurunan angka kemiskinan maka pemerintah Kabupaten Majalengka terus menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertujuan dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu kebijakan tersebut bergerak dalam bidang pemukiman yaitu bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin (Dewangga, n.d.).

Rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selain kebutuhan sandang dan pangan (Asnawi *et al.*, 2020). Pemenuhan mengenai kualitas rumah yang layak huni merupakan hak seluruh masyarakat dan hal tersebut tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak memiliki rumah layak huni sekalipun masyarakat miskin namun kondisi kemiskinan menyebabkan sulitnya akses terhadap hunian yang (Tursilarini & Udiati, 2020). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rumah tidak layak huni merupakan hunian yang mayoritas ditempati oleh penduduk miskin (Harianti, 2019). Rumah dikatakan tidak layak huni apabila tidak memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Permen PUPR, 2018).

Dalam mewujudkan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskin di Kabupaten Majalengka, pemerintah melalui Kementerian PUPR membuat suatu program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas rumah yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Indayani & Sadriah, 2020). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan bantuan untuk menciptakan rumah layak huni bagi MBR sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 1) Ketahanan Bangunan; 2) Kecukupan Luas Bangunan; 3) Akses Sumber Air Minum Layak; 4) Akses Sanitasi Layak.

Pada tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Majalengka mencapai 55.509 rumah (Open Data Jabar, n.d.). Dilihat dari aspek perumahan, Kabupaten Majalengka memiliki rasio rumah layak huni yang selalu meningkat dari tahun 2017-2021. Perubahan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019 dengan besaran peningkatan sebesar 1 persen. Sedangkan untuk rasio tertinggi rumah layak huni terjadi pada tahun 2021 yaitu 95,6 persen atau terdapat 349.784 unit rumah layak huni. Selain itu, rata-rata pengeluaran komoditi perumahan per bulan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 mencapai Rp222.503 dan menjadi penyumbang tertinggi dalam pengeluaran non-makanan.



Sumber: (Open Data Kabupaten Majalengka, 2022) data diolah

Gambar 1. Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021 dalam Persen (%)

Program BSPS telah berlangsung di Kabupaten Majalengka sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 2016-2020 dan 2022 dan telah membangun rumah layak huni sebanyak 2.798 rumah. Adanya program BSPS diharapkan memberikan dampak positif bagi penerima bantuannya yaitu terciptanya rumah layak huni sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan serta mampu meningkatkan keswadayaan penerima bantuan dan masyarakat sekitar dalam memiliki rumah yang layak huni. Oleh karena itu, mengetahui efektivitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan hal yang penting untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

B. Metode Penelitian

Dalam menentukan besaran efektivitas maka peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang diawali dengan menentukan teori yang ingin diuji lalu merancang teknik pendekatan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa angka di mana setelah data tersebut terkumpul digunakan untuk membuktikan atau mengevaluasi teori (Djamba & Neuman, 2002). Sedangkan Analisis deskriptif diawali dengan permasalahan yang jelas untuk dideskripsikan dengan jelas sehingga fokusnya untuk menjawab bagaimana dan siapa (Djamba & Neuman, 2002). Dalam penelitian ini mencakup desa yang berada di dua kecamatan dengan jumlah populasi 452 penerima BSPS tahun 2022. Metode penarikan sampel dari populasi ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Di mana :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Batas maksimal kesalahan yang ditoleransi (menggunakan 10%)

Berdasarkan hasil rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan 0,01 maka didapatkan sampel sebanyak 82 penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Majalengka tahun 2022.

Setelah mendapatkan sampel yang dibutuhkan maka dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari survei terhadap penerima BSPS dengan pengisian kuesioner secara offline untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas program BSPS dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu jumlah penerima program Bantuan Penerima Bantuan Jawa II di Kabupaten Majalengka tahun 2022 yang didapatkan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II dan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan No: 120/KPTS/Dr/2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan BSPS untuk Desa/Kelurahan dalam mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahun 2022.

Dalam penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner maka diperlukan operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu indikator keberhasilan dari program BSPS yang tertuang dalam Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan kebijakan umum pelaksanaan BSPS yang mencakup ketepatan sasaran, keswadayaan masyarakat, kualitas rumah layak huni sesuai SDGs, dan kesehatan. Setelah penentuan operasional variabel maka selanjutnya menentukan metode analisis data.

Penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data maka perlu menggunakan pendekatan skala. Dalam penelitian ini digunakan Skala Likert. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini akan menjelaskan variabel yang diukur ke dalam indikator variabel lalu diberi pernyataan dengan tingkatan mulai dari positif hingga negatif dan diberikan poin dari setiap pernyataan. Setelah penentuan poin dari setiap pernyataan, tahap selanjutnya adalah tabulasi data dan menjumlahkan total skor. Tahap terakhir dalam analisis data yaitu menghitung persentase capaian untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Kategori efektivitas merujuk pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 menggunakan kategori efektivitas sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Efektivitas

No.	Persentase Pencapaian	Kategori
1	>79,99	Sangat Efektif
2	60-79,99	Cukup Efektif
3	40-59,99	Kurang Efektif
4	<40	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004

C. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Majalengka Berdasarkan Wilayah, Usia, Pekerjaan, dan Pendapatan Per Bulan

Penelitian ini melibatkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Lemahsugih dan Malausma yang berada di Kabupaten Majalengka serta 82 responden. Adapun total desa yang menjadi objek penelitian dari kedua kecamatan tersebut sebanyak 12 desa. Desa dengan responden terbanyak yaitu Desa Padarek dengan jumlah responden sebanyak 15. Sedangkan desa dengan jumlah responden terendah yaitu Desa Dayeuhwangi, Desa Sadawangi, Desa Kepuh, Desa Sinargalih, dan Desa Kelapadua dengan masing-masing responden yaitu 5 responden.

Jika merujuk pada ketentuan penerima BSPS, diketahui bahwa penerima BPSPS merupakan WNI yang sudah memiliki KTP dan penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh range usia 36-45 tahun. Jumlah responden dengan range usia tersebut sebanyak 32 orang dengan persentase 39 persen. Sejalan dengan ketentuan tersebut di mana penerima memiliki pendapatan sebanyak-banyaknya 30 persen di atas upah minimum provinsi setempat. Diketahui bawah UMP Jawa Barat sebesar Rp. 1.841.487,31 pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 79 persen responden memiliki pendapatan hingga Rp. 1.000.000 dengan range pendapatan kisaran Rp. 300.000 – Rp. 1.000.000. Sedangkan hanya 6 persen yang memiliki pendapatan lebih dari UMP Jawa Barat. Jika dilihat berdasarkan pekerjaan maka diketahui dari 82 responden, sebanyak 38 responden atau 46 persen merupakan petani/buruh tani. Sedangkan hanya 1 persen responden yang bekerja pegawai swasta yang merupakan persentase terendah.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Setelah mendapatkan data mengenai efektivitas program BPSPS yang diperoleh dari kuesioner maka selanjutnya dilakukan pengujian data dengan menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas. Pada Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung (Pearson Correlation) dengan nilai *t* tabel atau taraf signifikan. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan pada 82 responden dengan menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 5% atau 0,05. Cara untuk memperoleh nilai *r* tabel maka terlebih dahulu mencari $Df = N-2 = 82 - 2 = 80$ sehingga diketahui nilai *r* tabel = 0,217. Data dinilai valid apabila nilai *r* hitung > *r* tabel dan nilai signifikan < 0.05. Adapun alat pengujian yang dipakai adalah rumus korelasi product moment pearson dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistica 26 (Darma, 2021). Berdasarkan hasil Uji Validitas, diketahui bahwa 32 pernyataan dinyatakan valid, karena koefisien yang dihasilkan lebih besar dari 0,217.

Selanjutnya dilakukan Uji Reliabilitas dengan melakukan perbandingan antara nilai Cronbach's Alpha dengan tingkat taraf yang digunakan. Dalam penelitian ini, tingkat taraf yang digunakan yaitu 0,6. Uji Reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistica 26. Berdasarkan hasil Uji Reliabilitas yang terdiri dari 82 responden diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,760 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,6. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa alat ukur pada penelitian ini reliabel.

Pembahasan

Penilaian efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang mencakup 32 pernyataan di mana pernyataan tersebut telah mencakup empat indikator keberhasilan BSPS. Pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai capaian efektivitas dari setiap indikator.

Indikator Ketepatan Sasaran

Sasaran dalam kegiatan BSPS adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat sesuai Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam indikator ketepatan sasaran terdapat 11 pernyataan yang mencakup ketepatan sasaran program BSPS. Pernyataan dalam indikator ini menilai tingkat persetujuan mengenai kondisi rumah sebelum mendapatkan bantuan yang meliputi kondisi fisik dan akses air minum layak serta sanitas. Selain itu, terdapat pernyataan pendukung mengenai dampak yang dirasakan setelah mendapatkan BSPS.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara keseluruhan rata-rata persentase indikator ketepatan sasaran mencapai 64% sehingga menurut kategori efektivitas PAN termasuk ke dalam cukup efektif karena berada di antara 60%-79,99%. Meskipun termasuk ke dalam kategori cukup efektif, angka tersebut dapat dikatakan relatif rendah karena berada di batas bawah range kategori tersebut. Hal tersebut didukung oleh tiga pernyataan yang memiliki nilai di bawah 50% dan termasuk ke dalam kategori kurang efektif.

Capaian nilai tersebut disebabkan oleh beberapa pernyataan yang memiliki persentase rendah seperti mengenai kepemilikan sumber air minum layak sebelum mendapat. Dari pernyataan tersebut sebanyak 82 responden menyatakan telah memiliki sumber air minum layak yang berasal dari mata air terlindungi dan sumur pelindung. Lalu, pernyataan kedua mengenai kondisi bahan lantai terluas rumah. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebanyak 78 responden sebelum mendapatkan BSPS memiliki kondisi lantai terluas berupa bukan tanah namun berupa kayu. Kedua pernyataan tersebut merupakan syarat dari aspek kualitas rumah yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan. Namun, berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa hampir sebagian besar responden sebelum mendapatkan bantuan telah memiliki kondisi sumber air minum layak dan kondisi lantai bukan tanah.

Dalam penentuan kriteria calon penerima bantuan digunakan sistem By Name, By Address. Sistem By Name, By Address adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan secara akurat dan tepat sasaran. Sistem ini membutuhkan data nama dan alamat lengkap penerima bantuan yang nantinya akan diverifikasi oleh tim verifikasi. Verifikasi calon penerima bantuan telah dipaparkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor: 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa verifikasi data calon penerima bantuan dilakukan secara faktual di lapangan terhadap daftar calon penerima bantuan yang disampaikan oleh Direktur Rumah Swadaya. Dalam tahap verifikasi ini dilakukan oleh Badan Penyedia Perumahan Jawa II dibantu oleh Satuan Kerja dan PPK dengan menugaskan tenaga fasilitator lapangan (TFL) dan Koordinator Kabupaten (Korkab) di mana dalam tahap ini TFL dan Korkab membuktikan kesesuaian syarat penerima bantuan.

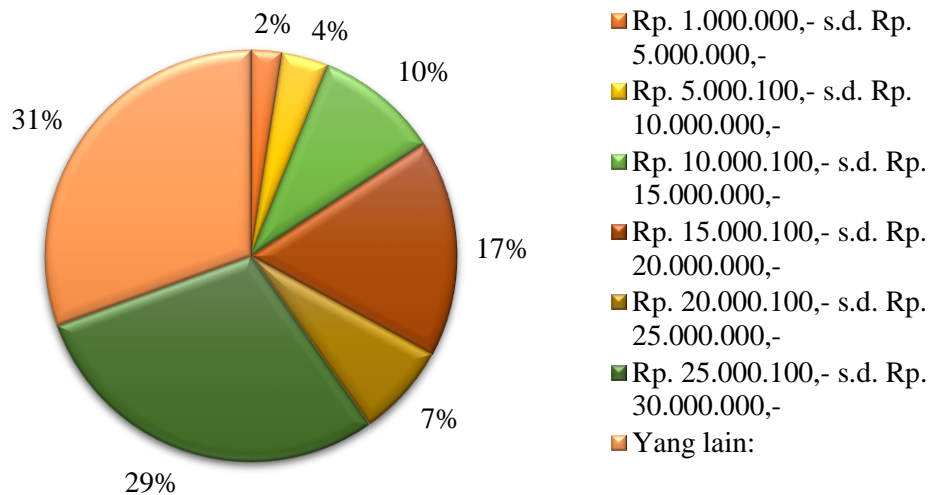
Namun, berdasarkan hasil lapangan diketahui bahwa terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi calon penerima bantuan. Penerima bantuan tersebut merupakan pengganti dari penerima bantuan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena penerima bantuan yang secara sah mendapatkan bantuan tidak sanggup untuk berswadaya atau mengeluarkan dana tambahan untuk melakukan perbaikan rumah. Oleh karena itu, penerima bantuan memberikan hak yang dimilikinya kepada tetangga atau keluarganya yang sanggup untuk berswadaya. Meskipun pengganti penerima bantuan dirasa tepat sasaran dalam aspek memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi sekalipun kriteria kepemilikan sumber air minum layak dan kondisi lantai tidak terpenuhi.

Indikator Keswadayaan Masyarakat

Dalam indikator keswadayaan masyarakat mencakup tiga sub-indikator, yaitu 1) Kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni; 2) Partisipasi dalam proses kegiatan; 3) Nilai atau besaran swadaya. Kata swadaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai kekuatan tenaga sendiri. Swadaya dalam Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menekankan pada prakarsa dan upaya masyarakat. Dalam indikator ketepatan sasaran mencakup 12 pernyataan yang mencakup ketiga sub-indikator tersebut.

Dibandingkan dengan indikator ketepatan sasaran, indikator keswadayaan masyarakat relatif lebih baik. Hal ini tercermin dalam rata-rata pencapaian indikator yang mencapai 73% sehingga dapat dikatakan bahwa indikator keswadayaan masyarakat cukup efektif dalam range 60%-79,99%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerima bantuan sudah berpartisipasi sejak proses verifikasi hingga kesediaannya untuk mengeluarkan biaya tambahan pembangunan rumah. Keberhasilan indikator ini mendukung salah satu syarat penerima bantuan BPS yaitu bersedia untuk berswadaya. Dalam indikator ini terdapat 9 pernyataan yang memiliki nilai persentase lebih dari 75% dan angka tersebut nyaris mendekati batas atas dalam range cukup efektif. Dari sembilan pernyataan tersebut enam di antaranya menggambarkan kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni dan keaktifan dalam proses kegiatan dan tiga pernyataan menggambarkan keswadayaan penerima bantuan dalam meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.

Pada pernyataan mengenai nominal bantuan yang dirasa kurang, memiliki nilai persentase tertinggi yaitu sebesar 86%. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa 36 responden menjawab Sangat Setuju dan 46 responden menjawab Setuju. Seperti yang diketahui bawah program BPS ini menysasar masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun batas penghasilan rendah yaitu kurang dari Upah Minimum Provinsi. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 memiliki UMP sebesar Rp1.841.487. Berdasarkan hasil penelitian mengenai data diri penerima bantuan diketahui bahwa 79 persen penerima bantuan memiliki penghasilan sampai dengan Rp1.000.000 dengan kisaran penghasilan antara Rp300.000-Rp1.000.000. Oleh karena itu, perlu adanya dana tambahan atau swadaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan yang bersumber dari dana pribadi atau sumber bantuan lainnya seperti bantuan tenaga, pinjaman dari keluarga atau tetangga.



Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023

Gambar 2. Besaran Swadaya

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa 31% responden atau sebanyak 25 responden mengeluarkan swadaya berupa uang tunai lebih dari Rp30.000.000 dengan kisaran swadaya yang dikeluarkan yaitu Rp35.000.000 – Rp60.000.0000. Swadaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan bersumber dari uang pribadi atau tabungan penerima bantuan tersebut atau pinjaman keluarga atau bank. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebesar 78% sumber dana swadaya berasal dari dana pribadi lebih. Selain itu, sebesar 48% dana tambahan bersumber dari bantuan keluarga/tetangga/penerima bantuan. Oleh karena

itu, dapat dikatakan bahwa mayoritas sumber swadaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan bersumber dari dana pribadi. Adapaun bentuk swadaya lain yaitu gotong royong. Gotong royong dalam program merupakan salah prinsip yang diusung. Oleh karena itu, dalam program BSPS ini diharapkan mampu meningkatkan gotong royong dalam masyarakat dan sesama penerima bantuan dalam membangun rumah yang layak huni. Berdasarkan hasil penelitian diketahui capaian persentase gotong royong sebesar 67%. Ketika program BPS berlangsung terdapat beberapa penerima bantuan yang terletak satu blok desa sehingga saat pembangunan berlangsung maka setiap penerima bantuan fokus pada pembangunan rumahnya dan hanya mengandalkan tukang bangunan saja sebagai tenaga kerja tambahan karena tetangganya pun sedang melakukan pembangunan juga.

Indikator Kualitas Rumah Layak Huni sesuai SDGs

Indikator kualitas rumah layak huni sesuai dengan SDGs mencakup empat sub-indikator, yaitu 1) Ketahanan Bangunan; 2) Akses Sanitasi; 3) Akses Air Minum; 4) Kecukupan Ruang. Dalam indikator ini tercermin ke dalam tujuh pernyataan yang mewakili kondisi rumah penerima bantuan setelah mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hasil pada indikator ini jauh lebih tinggi dari indikator sebelumnya karena hampir seluruh responden menyetujui adanya peningkatan pada kualitas rumah setelah mendapatkan bantuan. Rata-rata keseluruhan indikator ini mencapai 81% dan terkategori Sangat Efektif dalam *range* >79,99%. Angka tersebut sedikit lebih besar dari batas bawah *range* tersebut. Namun jika dibandingkan dengan indikator ketepatan sasaran, indikator ini telah menunjukkan peningkatan yang besar yakni 17%.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa empat dari enam komponen kualitas rumah layak huni telah memiliki persentase lebih dari 80% dan sudah tergolong ke dalam sangat efektif. Dari keempat pernyataan tersebut, aspek kualitas rumah layak huni yang memiliki persentase tertinggi yaitu peningkatan pada kondisi lantai dan atap lalu disusul dengan kondisi dinding yang memiliki capaian persentase lebih dari 90%. Pada kondisi lantai, sebelum mendapatkan bantuan, hanya 4 responden yang memiliki kondisi lantai terluas berupa tanah sedangkan 78 responden lainnya telah memiliki kualitas lantai yang baik. Hal tersebut disebabkan karena sebagian responden memiliki kondisi lantai di beberapa rumah mayoritas bukan menggunakan tanah. Pada kondisi atap sebelum mendapatkan bantuan memiliki kondisi yang tidak layak. Sebelum mendapatkan BPS hanya 7 responden yang memiliki atap dengan kondisi yang layak. Setelah mendapatkan BPS hampir seluruh responden yakni 81 responden memiliki kondisi atap yang layak.

Pada kondisi dinding pun mengalami peningkatan karena hampir seluruh responden mengubah bentuk bangunannya. Sebelum mendapatkan bantuan, mayoritas rumah responden yaitu berbentuk rumah panggung sehingga dinding yang digunakan pun terbuat dari bilik atau anyaman bambu atau kayu. Kondisi dinding sebelum mendapatkan BPS dikatakan tidak layak karena kondisi dinding yang sudah lapuk dan terdapat lubang-lubang. Setelah mendapatkan bantuan, sebagian responden membangun kembali rumahnya menjadi bangunan permanen dan semi permanen. Bahan untuk dinding yang digunakan berupa batu bata atau batako sehingga penerima bantuan merasa kondisi rumah menjadi jauh lebih aman dan sehat.

Capaian pada sisi keamanan dan kesehatan memiliki nilai persentase tertinggi yaitu sebesar 95%. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa sebanyak 64 responden menjawab Sangat Setuju dan 18 responden menjawab Setuju. Menurut penerima bantuan dengan adanya bantuan BPS ini telah membantu memperbaiki kondisi rumah mereka menjadi lebih aman dari sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena selama pembangunan berlangsung pihak TFL rutin melakukan *monitoring* dan memberikan arahan mengenai struktur komponen rumah yang harus terpenuhi. Selain itu, perbaikan rumah yang telah dilakukan membuat penerima bantuan menjadi lebih aman dari risiko terkena bencana karena terdapat beberapa rumah yang rawan terkena pergerakan tanah.

Indikator Kesehatan

Indikator kesehatan merupakan indikator tambahan dalam indikator keberhasilan kegiatan BPS. Dalam indikator ini terdapat dua sub-indikator yaitu kecukupan pencahayaan dan penghawaan. Rumah dikatakan layak huni apabila memiliki sirkulasi udara yang baik dan tidak lembap (Syaputra *et al.*, 2020). Salah satu penilaian mengenai indikator ini yaitu penggunaan jendela dan ventilasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indikator ini memiliki tingkat persentase sebesar 79% sehingga dapat dikategorikan sebagai Cukup Efektif dalam *range* 60%-79,99%. Angka tersebut merupakan angka maksimal dalam kategori tersebut.

Kepemilikan aspek pencahayaan dan penghawaan merupakan dasar perencanaan rumah sehat dan nyaman (Ashadi *et al.*, 2017). Dalam (Suryani & Nazar, 2015) jendela pada rumah merupakan lubang yang berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara dan tempat untuk mendapatkan pencahayaan alami dari luar. Pencahayaan alami memiliki peran penting dalam mengurangi kelembapan pada rumah. Cahaya alami yang masuk ke dalam rumah dapat berfungsi dalam menjaga kesehatan manusia dan memberi rasa nyaman untuk beraktivitas pada penghuninya (Ashadi *et al.*, 2017). Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pramudiyani & Prameswari, 2011) kepemilikan jendela yang dapat dibuka atau jendela tidak permanen dapat mengurangi risiko penyakit *pneumonia* pada balita. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan jendela permanen atau jendela yang terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka dapat memungkinkan berkembangnya salah satu mikroorganisme penyebab *pneumonia*. Oleh karena itu, jendela pada rumah tidak hanya sebagai jalan untuk masuknya cahaya namun dapat berfungsi selayaknya ventilasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa setelah mendapatkan bantuan sebanyak 78 penerima bantuan tidak lagi menggunakan jendela permanen dan memiliki ventilasi yang cukup. Hal tersebut pun didukung dengan rata-rata perubahan jenis rumah yang semulanya rumah panggung menjadi bangunan permanen dengan penggunaan jendela tidak permanen. Namun, masih terdapat responden yang memilih tidak setuju. Responden yang memilih tidak setuju hanya menggunakan jendela tidak permanen pada bagian depan rumah saja, untuk ruangan seperti kamar tidur masih menggunakan jendela permanen. Hal tersebut disebabkan kurangnya biaya yang karena fokus pembangunan penerima bantuan yaitu pada kondisi struktur rumah dan pembangunan sanitasi.

Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Majalengka

Efektivitas merupakan pengukuran suatu kebijakan apakah mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan awal dari kebijakan tersebut (Romadhan *et al.*, 2022). Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Program BSPS memiliki tujuan untuk menciptakan hunian rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema BSPS. Dalam mencapai tujuan tersebut maka terdapat indikator-indikator keberhasilan program BSPS yang perlu dicapai secara efektif.

Secara keseluruhan efektivitas program BSPS di Kabupaten Majalengka mencapai 73% dan menurut kategori PAN termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif. Capaian persentase tersebut cukup menggambarkan tujuan dari BSPS yaitu mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya. Dalam hal tujuan untuk menciptakan rumah layak huni bagi MBR sesuai dengan kriteria *SDG's* sudah terlihat dalam capaian indikator ketepatan sasaran, kualitas RLH sesuai *SDGs*, dan kesehatan yang sudah mencapai kategori cukup efektif dan sangat efektif. Di antara ketiga indikator tersebut, indikator kualitas RLH sesuai *SDG's* lah yang memiliki capaian persentase tertinggi. Adanya peningkatan persentase dari indikator ketepatan sasaran terhadap indikator kualitas RLH diiringi dengan persentase pada indikator kesehatan yang cukup tinggi merupakan cerminan dari tercapainya tujuan BSPS yaitu terpenuhinya akses dalam pemenuhan rumah layak huni.

Peningkatan kualitas rumah tersebut tidak lepas dari dana swadaya yang dikeluarkan oleh setiap penerima bantuan. Adanya BSPS pun bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan dari penerima bantuan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh bahwa dengan adanya keswadayaan masyarakat yang tinggi maka membantu dalam pembangunan rumah menjadi lebih layak huni. Pada indikator keswadayaan yang mencapai angka 73% cukup untuk menggambarkan bahwa keswadayaan masyarakat baik dalam proses pembangunan rumah dan peningkatan kesadaran mengenai RLH cukup baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gotong royong merupakan prinsip dalam program BSPS dan bantuan yang diberikan merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat untuk mencapai *output* dari program ini. Swadaya yang dikeluarkan tidak hanya gotong royong antar tetangga/keluarga/penerima bantuan namun tabungan dan pemanfaatan serta sumbangan bahan bangunan yang dimiliki. Oleh karena itu, secara keseluruhan keempat indikator keberhasilan program BSPS telah mencapai kategori Cukup Efektif. Pencapaian indikator keberhasilan tersebut telah sejalan dengan tujuan dari program BSPS yaitu menciptakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan melibatkan keswadayaan dari penerima bantuan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Majalengka memiliki efektivitas yang cukup dengan rata-rata persentase capaian sebesar 73%. Meskipun masih dalam kategori cukup efektif, program ini berhasil mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Setiap indikator keberhasilan memiliki capaian di atas 60% dan tergolong ke dalam cukup efektif di mana indikator Ketepatan Sasaran memiliki persentase terendah yakni 63% dan indikator kualitas rumah layak huni sesuai *SDG's* memiliki capaian tertinggi yakni sebesar 81%.

Daftar Pustaka

- Ashadi, A., Anisa, A., & Nefiyanti, N. (2017). *Konsep Disain Rumah Sederhana Tipe Kecil Dengan Mempertimbangkan Kenyamanan Ruang* (1st ed., Vol. 16). Jurnal Arsitektur NALARs.
- Asnawi, R., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2020). *Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan Dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara Ratnajati* (2nd ed., Vol. 21). Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (Persen) 2021-2023*.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*. Guepedia.
- Dewangga, P. (n.d.). *Covid-19 Mereda, Bagaimana Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Majalengka* .
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Harianti, R. (2019). *Kajian Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni (Rlh) Di Kecamatan Benai* (1st ed., Vol. 2). Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer.
- Indayani, I., & Sadriah, S. (2020). *Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Terhadap Pengentasan Kemiskinan* (2nd ed., Vol. 2). Journal Of Economic, Public, And Accounting (JEPA).
- Open Data Jabar. (n.d.). *Jumlah Pemilik Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Yang Memiliki Lahan Sendiri Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat* .
- Permen PUPR. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRt/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*.
- Pramudiyani, N. A., & Prameswari, G. N. (2011). *Hubungan Antara Sanitasi Rumah dan Perilaku dengan Kejadian Pneumonia Balita* (2nd ed., Vol. 6). Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Romadhan, A. A. R., Habibah, S., Taqwa Sihidi, I., & Kamil, M. (2022). *Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Tabalong : Sebuah Evaluasi* (1st ed., Vol. 4). Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Suryani, I., & Nazar, J. (2015). Hubungan Lingkungan Fisik dan Tindakan Penduduk dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1), 157–167.

Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2020). *Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan* (2nd ed., Vol. 1). Jurnal Kommunity Online.

Taufiq N. (2022). *Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem*.

Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). *Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka* (1st ed., Vol. 44). Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial.